


Konsep Nasionalisme Michael Sastrapratedja: Sebuah Tinjauan Filsafat Pancasila dalam Rangka Pengembangan Karakter Bangsa

Agus Arianto¹

¹Magister Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Email: agus.arianto@mail.ugm.ac.id¹

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 09-02-2022	Direview: 23-04-2022	Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan kebangsaan di Indonesia, salah satunya adalah *tension* antara budaya lokal dengan budaya global, yang mengakibatkan berubahnya opini generasi muda terhadap pentingnya nasionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang konsep nasionalisme Michael Sastrapratedja guna memberikan solusi terkait persoalan kebangsaan yang ada di Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan sikap kritis masyarakat Indonesia dalam melihat peluang dan ancaman globalisasi terhadap keutuhan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode hermeneutika filosofis dengan model pendekatan historis-faktual tokoh. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa nasionalisme Michael Sastrapratedja lebih fokus pada internasionalisme humanis dengan menekankan pada keseimbangan antara budaya lokal dan budaya global. Globalisasi bukanlah sebuah ancaman, sebaliknya globalisasi merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan transformasi budaya. Nasionalisme dengan pendekatan Pancasila menjadi pedoman utama terkait menentukan sikap kritis dalam kancah global. Nasionalisme Michael Sastrapratedja berbentuk kritis-progresif visioner yang melihat tujuan nasionalisme sebagai sebuah transformasi positif.

Kata Kunci: Pancasila; transformasi budaya; globalisasi; nasionalisme

Abstract

This research departs from national issues in Indonesia, one of which is the tension between local culture and global culture, which results in changing the opinion of the younger generation on the importance of nationalism. The purpose of this study is to review Michael Sastrapratedja's concept of nationalism in order to provide solutions related to national problems that exist in Indonesia. Thus, to raise awareness of nationalism and a critical attitude of the Indonesian people in seeing the opportunities and threats of globalization to the integrity of Indonesia. This research is qualitative research that uses a philosophical hermeneutic method with a historical-factual approach model of the character. The results of this study indicate that Michael Sastrapratedja's nationalism focused more on humanist internationalism by emphasizing the balance between local culture and global culture. Globalization is not a threat, on the contrary globalization is an opportunity for cultural transformation. Nationalism with the Pancasila approach is the main guideline regarding determining critical attitudes in the global arena. Michael Sastrapratedja's nationalism is in the form of a critical-progressive visionary who sees the goal of nationalism as a positive transformation.

Keywords: Pancasila; cultural transformation; globalization; nationalism

1. Pendahuluan

Nasionalisme merupakan dasar bagi warga negara untuk membentuk sikap terkait bagaimana seharusnya bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk hubungan yang intens antarwarga, pemerintah dan negara terkait pelaksanaan suatu pemerintah dalam satu kesatuan yang menjadi cita-cita bersama. Artinya, dalam pandangan nasionalisme itu sendiri harus memuat aturan yang bisa menumbuhkan kesadaran yang nyata tentang paham kebangsaan. Terkait bagaimana bentuk nasionalisme yang harus ditumbuhkan, menjadi paham dan metode tersendiri di masing-masing negara. Hal tersebut menjadikan paham nasionalisme di setiap negara berbeda-beda penerapannya. Kohn

(1985) menyatakan bahwa nasionalisme adalah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu berada dan diserahkan pada negara bangsa dengan asas mencapai cita-cita bersama. Perry (2013) memahami nasionalisme sebagai suatu ikatan kesadaran bersama oleh sekelompok orang yang terdiri atas kebersamaan bahasa, budaya dan sejarah dengan asas kejayaan dan penderitaan bersama. Pada dasarnya nasionalisme memang lahir dari bermacam-macam cara, mulai dari karena kesamaan sejarah, kebudayaan, cita-cita, ketidakadilan, penindasan, serta sebagai wujud perlawanan suatu kelompok bangsa.

Nasionalisme dewasa ini dipahami secara sempit dengan mendefinisikannya sebagai sikap patriot yang masih terjebak pada pemahaman era penjajahan. Hal tersebut menimbulkan stigma bahwa nasionalisme hanya berlaku sebagai bentuk perjuangan kebangsaan di era kolonialisme. Konsekuensi dari pandangan tersebut menggugurkan sekaligus mengenyampingkan peran serta generasi milenial yang menganggap nasionalisme dengan takaran dan bentuk yang berbeda. Nasionalisme seperti hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk nasionalisme dalam artian yang sempit. Nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa *reserve*, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis (Kusumawardani, 2015).

Acemoglu (2012) menyatakan bahwa pengaplikasian politik ekstraktif suatu negara yang gagal menawarkan insentif kepada rakyat menjadi salah satu penyebab gagalnya nasionalisme diterapkan. Sementara, perkembangan ekonomi global juga berpengaruh pada sistem nasionalisme berbagai negara di belahan dunia. Globalisasi ekonomi memberikan kekuatan pada strategi nasionalis global dengan menyediakan elit nasionalis (terutama kalangan minoritas di negara maju) berupa perangkat kebijakan yang efektif, seperti memberdayakan kebijakan ekonomi kawasan baru (Anaid, 2014). Langkah tersebut tentunya akan menarik minat nasionalisme bagi para minoritas, sehingga perkembangan ekonomi global akan tetap seimbang dengan nasionalisme negara tersebut. Hal ini menjadi pembuka persoalan nasionalisme yang ada di Indonesia. Peluang penerapan kebijakan yang pincang menjadi salah satu penyebab penghambat kemajuan nasionalisme di Indonesia. Pemerintah sering menggunakan kekuasaan demi kepentingan individu ataupun golongan, hal ini memunculkan stigma dan sikap ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Persoalan ini akan membuka jalan bagi persoalan-persoalan nasionalisme lainnya yang ada di Indonesia.

Problem pertama yang menjadi sorotan dalam nasionalisme di Indonesia adalah *tension* antara budaya lokal dengan budaya global. *Tension* tersebut sangat jelas jika dihadapkan pada konteks opini generasi muda. Budaya lokal (Indonesia) sedikit demi sedikit mulai terkikis dan tergantikan dengan budaya global, terutama di kota-kota besar. Perkembangan globalisasi dianggap bukan lagi menjadi ancaman bangsa, tetapi lebih sebagai bagian dari segi kehidupan yang sangat dibutuhkan bagi generasi muda saat ini. Generasi muda memandang kehidupan berbangsa dan bernegara tidak harus dibatasi dengan sekat-sekat. Tidak perlu menghadirkan kembali ketegangan masa lalu ataupun prediksi masa depan bangsa terkait nasionalisme. Hal utama yang harus diuraikan adalah cukup dengan sikap menghargai dan mengakui diri sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia. Semangat kebangsaan dari masa ke masa terus berubah seiring dengan perubahan kebutuhan zaman. Perjuangan kebangsaan pada zaman penjajahan dengan zaman milenial yang sarat akan perkembangan teknologi informasi menempatkan satu distingsi yang cukup tajam dalam memaparkan makna perjuangan tersebut. Para milenial tidak lagi ditakutkan pada ancaman penjajahan secara fisik, tetapi memiliki tantangan yang cukup berat pada ranah sikap dan mental. Hal tersebut kemudian menjadikan nasionalisme harus dilihat dariacamata yang lebih luas.

Problem kedua adalah persoalan internal bangsa yang berkaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semangat persamaan asas. Hal ini mengacu pada ketegangan yang sering terjadi di Indonesia, yakni golongan agama dengan nasionalis. Ketegangan ini biasanya sering mewarnai pandangan politik, tetapi tidak jarang memiliki dampak yang serius bagi perkembangan nasionalisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terlibat dalam ketegangan tersebut kurang memahami makna nasionalisme dan historisitas perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua pihak saling mengedepankan ego masing-masing dan berusaha menggiring suatu isu yang mengarah pada permusuhan dan perpecahan bangsa.

Pada konteks yang lain, separatisme dan terorisme menjadi ancaman yang cukup menyita perhatian terkait persoalan kebangsaan. Hal tersebut diperparah dengan kehidupan individualis di kota-kota besar di Indonesia, ini kemudian menciptakan suatu tatanan yang membentuk kelas sosial baru di kalangan masyarakat. Beberapa ancaman tersebut berdampak pada luntarnya persatuan Indonesia yang dimaknai dalam ragam kesetaraan dan kebersamaan. Kemudian, memunculkan jarak yang menciptakan anggapan “kita” dan “mereka” dalam memaknai kehidupan sosial. Secara historis bangsa Indonesia pada *proto*-nasional juga terjadi pemisahan seperti hal tersebut, tetapi konteksnya berada pada partai politik.

Kebutuhan konsep yang fleksibel ketika berhadapan dengan persoalan kebangsaan, terutama berkaitan dengan *tension* yang terjadi di Indonesia, nasionalisme sebagai prinsip dasar kebangsaan dapat berfungsi sebagai metode solusi terhadap penyelesaian persoalan kebangsaan yang ada. Penelitian ini diharapkan mampu mengangkat sisi fleksibilitas nasionalisme atas persoalan-persoalan kebangsaan, sehingga mampu menguatkan identitas kebangsaan, membangun kepercayaan diri bangsa, dan memunculkan minat daya saing budaya lokal yang sejajar dengan budaya global.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hermeneutika filosofis, yang menggunakan model pendekatan historis-faktual terhadap pemikiran tokoh, dengan kajian kepustakaan (Bakker & Zubair, 1990). Bahan utama yang digunakan berupa data kepustakaan yang meliputi konsep pemikiran mengenai nasionalisme Michael Sastrapratedja serta Filsafat Pancasila. Bahan-bahan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka, berupa buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Objek material dalam penelitian ini adalah konsep nasionalisme dalam pemikiran Michael Sastrapratedja serta *problem* dan relevansinya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Objek formal dalam penelitian ini adalah Filsafat Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pandangan Umum Filsafat Pancasila

1) Asas Ketuhanan

Notonagoro (1980) menyatakan bahwa isi arti Sila Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan pada pengertian hakikat Tuhan. Sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan sebagai *causa prima* (penyebab pertama segala sesuatu). Artinya, negara Indonesia merupakan suatu akibat yang diadakan oleh Tuhan sebagai penyebab pertama. Notonagoro (1980) menyatakan bahwa ada dua hubungan antara negara Indonesia dan Tuhan, *pertama*, hubungan langsung berupa kemerdekaan Indonesia sebagai rahmat Tuhan sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *edua*, hubungan tidak langsung, yakni melalui perantara manusia sebab berdirinya negara Indonesia, sehingga paksaan terhadap suatu agama, sikap anti ketuhanan dan anti keagamaan tidak dibenarkan ada di Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia yang mengakui asas ketuhanan sebagai landasan utama dalam bernegara, sehingga Tuhan merupakan tujuan segala-galanya termasuk juga tujuan negara. Meskipun mengakui Tuhan sebagai aspek segala sesuatu, tetapi dalam pelaksanaannya, negara Indonesia yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara bukanlah negara sebagai organisasi agama. Negara Indonesia tidak memaksakan agama manapun kepada warganya, dan negara tidak pula memiliki kekuasaan untuk memaksa keyakinan terhadap warganya, karena negara Indonesia bukanlah teokrasi, bukan organisasi pelaksanaan agama. Oleh karena itu, sila ketuhanan tidak boleh diformulasikan menjadi cara tertentu untuk melaksanakan suatu ibadah dan memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana nyaman, memiliki tata tertib yang cocok untuk agama-agama terutama untuk kebaktian kepada Tuhan, sehingga dengan cara tersebut memunculkan sikap toleransi (Sudiarja, 2006). Demikian, ketuhanan dalam kerangka Pancasila merupakan asas moral yang kuat bagi kehidupan publik-politik negara Indonesia berdasarkan moralitas ketuhanan.

2) Asas Kemanusiaan

Prinsip kedua Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari kemanusiaan universal. Pada prinsip ini mengandung penegasan (sebagaimana yang dikatakan Soekarno) bahwa bangsa Indonesia tidak menganut paham nasionalisme yang picik, melainkan nasionalisme yang luas. Internasionalisme bagi Soekarno sama dengan *humanity*, perikemanusiaan. Sementara itu, Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsentrasi ke dalam dan ke luar. Ke dalam, menjadi pedoman negara untuk memuliakan nilai-

nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, dengan menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan Indonesia”. Ke luar, menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Latif, 2011). Konsep kemanusiaan dalam sila ini lebih erat dengan istilah persaudaraan, yakni adanya keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan hak sosial, sehingga istilah kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengacu pada “kemanusiaan” secara universal dan internasionalisme, artinya dalam pelaksanaan aspek yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa ada sekat lokalisme ataupun *chauvinistis* yang sempit. Sementara itu, menurut Bakry (2001) dalam perwujudan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang perlu diperhatikan dan yang merupakan dasar hubungan sesama umat manusia ialah pengakuan hak asasi manusia. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya.

3) Asas Kebangsaan

Konsep dalam sila Persatuan Indonesia ini, terlebih dahulu menampilkan hakikat “satu” sebagai bentuk penjabaran dari makna kesatuan itu sendiri, dalam penentuan hakikat “satu” ini, Notonagoro (1980) menyampaikan bahwa sifat-sifat negara harus sesuai dengan kaidah yang mutlak utuh dan tidak bisa dibagi-bagi. Satu merupakan sifat mutlak dari masing-masing pribadi atau benda yang mempunyai unsur berbeda dan tidak terpisah.

Hakikat satu memiliki keterkaitan erat dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, tetapi keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, justru keanekaragaman itu bersatu dalam suatu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002). Persatuan Indonesia mengandung pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yakni mengandung pengertian kesadaran adanya perbedaan-perbedaan yang biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut memunculkan usaha untuk menarik ke arah kerjasama dan kesatuan yang resultan guna mengurangi konflik atas perbedaan. Sila Persatuan Indonesia ini menjwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjwai sila keempat dan juga sila kelima (Kiron, 2011).

4) Asas Kerakyatan

Kerakyatan menurut Soeprapto (2014) mengandung sifat cita-cita kefilisafatan, yaitu negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, mengandung pula pengertian demokrasi dalam arti cita-cita kefilisafatan. Cita-cita kefilisafatan demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Demokrasi politik untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik. Demokrasi sosial ekonomi untuk mengadakan persamaan dalam lapangan kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan demokrasi politik sebagai dasarnya.

Kedua makna demokrasi tersebut memiliki hubungan yaitu, bahwa demokrasi politik merupakan jalan bagi terciptanya kesejahteraan sosial-ekonomi atau demokrasi ekonomi. Bilamana dirinci lebih saksama, maka pengertian sila keempat yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

- (a) Pengertian ‘*kerakyatan*’ secara filsafati bahwa negara diperuntukkan bagi keperluan rakyat, sehingga negara harus sesuai dengan kepentingan rakyat.
- (b) Pengertian demokrasi terikat dengan kata-kata permusyawaratan/perwakilan, merupakan cita-cita kefilisafatan demokrasi, terutama terkait dengan demokrasi politik, sebagai syarat wajib tercapainya maksud kerakyatan.
- (c) Pengertian ‘*kerakyatan*’ mengandung cita-cita *demokrasi sosial-ekonomi*. Tujuan demokrasi sosial-ekonomi adalah untuk menciptakan kesamaan lapangan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dengan dasar syarat demokrasi politik.
- (d) Sila keempat juga mengandung dasar bagi sila kelima sebagai kesatuan yang bersifat *hierarkis* dan *piramidal* (Kaelan, 2002).

5) Asas Keadilan Sosial

Cita-cita dari keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah dasar dari pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi seluruh bangsa Indonesia. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan, negara hendak mewujudkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Notonagoro (1980) menyatakan bahwa hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan suatu hak dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara satu dengan yang lain adalah suatu kewajiban. Maka, keadilan sosial tersebut harus memenuhi keadilan tiga segi. Segi pertama, keadilan distributif, yaitu kewajiban komponen bangsa atas warga negara. Segi kedua, keadilan legal, yaitu kewajiban komponen bangsa terhadap negara. Segi ketiga, keadilan komutatif, yaitu berupa hubungan keadilan timbal balik antara semua komponen bangsa. Sementara itu, di lain keadilan dapat dibedakan dalam empat aspek. Pertama, keadilan distributif (*iustitia distributiva*) merupakan keadilan dalam bentuk tanggung jawab pimpinan masyarakat kepada warga dengan beban sosial, fungsi-fungsi, balas jasa dan kehormatan secara proporsional dengan kecakapan masing-masing. Kedua, keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) merupakan keadilan keseimbangan antara prestasi dan kontra-prestasi, antara jasa dan balas jasa dalam hubungan antarwarga, atau memberikan keadilan yang sama kepada seluruh warga. Ketiga, keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) berupa keadilan pemberian hukuman yang sesuai terhadap kesalahan yang bersangkutan. Keempat, keadilan protektif (*iustitia protectiva*) merupakan perlindungan terhadap semua manusia, sehingga tidak seorangpun yang mendapat perlakuan sewenang-wenang (Suryatni, 2016).

b. Landasan Dasar Nasionalisme Michael Sastrapratedja

1) Sosio-Humanis

Nasionalisme dalam pandangan Michael Sastrapratedja mengedepankan aspek sosio dan budaya sekaligus. Landasan sosio-humanis memberikan dorongan yang kuat dalam mewujudkan nasionalisme terutama jika berhadapan dengan kehidupan bersama. Nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari penghayatan sisi kemanusiaan dari aspek yang konkrit. Artinya, bahwa nasionalisme muncul dari kebutuhan manusia secara bersama yang terorganisir dalam satu aspek bangsa. Michael Sastrapratedja meninjau bahwa nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari aspek sosio-humanis. Misalnya, ketika Michael Sastrapratedja membicarakan *civil society*, dalam nasionalisme harus memuat tujuan dasar dari hak-hak masyarakat, bentuk-bentuk asosiasi yang menuju pada persatuan dan perwujudan kepentingan bersama (baik kelompok maupun individu) (Sastrapratedja, 2001).

Perkembangan sosial juga membawa pada berbagai persoalan dalam masyarakat, jika dikaitkan dengan hak-hak sipil maka persoalan yang sering muncul adalah intoleransi dan pluralisme. Melalui pandangan nilai-nilai sosial-humanis dalam *civil society*, nasionalisme hadir dengan memantapkan kesatuan visi demi mewujudkan manusia yang integral dalam wadah kebhinekaan. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan lagi menjadi halangan, tetapi lebih merekatkan dan memberikan warna yang beragam dalam menyikapi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pluralisme menurut Sastrapratedja (2001) menekankan nilai kebhinekaan dan perbedaan. Meskipun demikian, harus ada konsensus atau kesepakatan terhadap nilai-nilai dasar. Jika kesepakatan tidak tercipta, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga nasionalisme di sini harus memuat aspek sosial integrasi masyarakat dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, artinya harus menciptakan rekonsiliasi dan kebutuhan akan sistem guna mengapresiasi perbedaan dan tujuan berbagai kelompok secara bebas (tepat sasaran).

Sosio-humanis bagi Michael Sastrapratedja memberikan peluang bagi nasionalisme untuk mampu mendefinisikan lebih jauh terhadap dampak dan kemungkinan yang terjadi akibat perubahan sosial. Hal tersebut kemudian menjadikan nasionalisme tidak hanya berperan sebagai asas dari pemersatu bangsa, tetapi juga bisa menjadi sikap kritis dan landasan dalam melihat aspek-aspek positif dari perubahan. Proses perubahan sosial yang terjadi tidak hanya dilihat dari aspek akibat negatif terhadap integralistik suatu negara-bangsa, tetapi juga mampu disikapi secara luas dan positif.

2) Historis Budaya

Budaya dan nasionalisme menurut pandangan Michael Sastrapratedja merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Nasionalisme muncul karena adanya perkembangan budaya, artinya budaya muncul dengan menyertakan problem baru terhadap persoalan integritas dan identitas bangsa. Hal tersebut memaksa suatu masyarakat bangsa untuk mewujudkan visi yang sama dalam dimensi integralistik, sehingga memunculkan semangat juang yang disebut dengan nasionalisme. Michael Sastrapratedja memaparkan bahwa nasionalisme tidak lahir dari keberadaan yang nol sama sekali, dalam artian bahwa nasionalisme dan negara-bangsa muncul karena pengaruh dunia modern menyediakan kondisi yang diperlukan dan bersifat internasional, yaitu bahwa nasionalisme bekerja melalui kerangka oposisi riil atau dibayangkan terhadap bangsa lain (Sastrapratedja, 2013).

Kondisi budaya yang terus berubah menjadi acuan bagi nasionalisme untuk berkembang pula. Perkembangan nasionalisme mengacu pada kebutuhan bangsa akan kemajuan yang diakibatkan dari perubahan budaya. Nasionalisme harus memuat anjuran dan batasan yang jelas terkait perkembangan zaman, hal ini ditujukan agar kehidupan berbangsa tidak mengalami kebuntuan dan kehilangan identitas diri bangsa itu sendiri. Hal tersebut menjadikan pedoman yang ditawarkan nasionalisme tidak membutuhkan bangsa untuk melihat perubahan baik menolak ataupun menerima secara mentah perubahan budaya yang ada.

3) Peran Moralitas Pancasila terhadap Persoalan Nasionalisme

Moralitas Pancasila menurut pandangan Michael Sastrapratedja dalam menanggapi persoalan-persoalan nasionalisme memiliki tiga peranan penting; Pancasila sebagai referensi kritik sosial, Pancasila sebagai penentuan nilai dalam *civil society*; dan peran Pancasila terhadap tantangan globalisasi. Pertama, Pancasila sebagai referensi kritik sosial di sini menempatkan Pancasila sebagai acuan kritik terhadap perkembangan sosial-budaya sekaligus sebagai suatu referensi dalam membangun visi bangsa dalam tatanan sosial-budaya. Fungsi pertama sebagai kritik terhadap sosial-budaya menjadikan Pancasila sebagai filter bangsa terhadap hal-hal yang dianggap negatif dan bisa merusak tatanan sosial-budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dapat mengacu pada pedoman Pancasila yang berkaitan dengan penggerusan identitas bangsa, tatanan politik, dan ideologi bangsa. Semua itu merupakan cakupan secara umum yang menjadi basis ketika melihat bangsa Indonesia secara umum. Fungsi kedua Pancasila sebagai bahan referensi dalam membangun visi menjadi langkah yang futuristik, artinya perancangan tujuan bangsa Indonesia di masa depan diberikan arah sesuai dengan pedoman dan pelaksanaan Pancasila. Visi memberikan arah dalam menentukan jalan untuk menuju tujuan yang ingin dicapai. Pancasila dalam hal ini berarti menjadi jalan utama untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat Indonesia yang menginginkan kesejahteraan dan idealitas dalam tatanan sosial-budaya. Pancasila memberikan pedoman, spirit dan sisi ideal dari dorongan terdalam masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bangsa (Sastrapratedja, 2001).

Kedua, Pancasila sebagai penentu nilai dalam lapangan *civil society*. Moralitas Pancasila kedua ini menekankan peranan semua elemen bangsa untuk ikut andil terhadap krisis kemanusiaan, toleransi, dan persatuan. Toleransi menjadi aspek penting ketika berhadapan dengan persoalan pluralisme di Indonesia yang majemuk, tidak hanya agama, tetapi juga suku, bahasa dan budaya. Pancasila memberikan fondasi yang kuat terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Konflik-konflik kepentingan, etnis dan agama yang sering terjadi di Indonesia menggambarkan adanya ketidakselarasan terhadap praktik moralitas Pancasila, dalam hal ini aspek moralitas menentukan arah toleransi yang mengarahkan masyarakat untuk mempunyai sikap dan menerima perbedaan. Aspek persatuan juga menjadi titik utama dalam persoalan nasionalisme di Indonesia. Masyarakat diharapkan mampu memiliki kedewasaan sikap mental dan pola pikir dalam menyikapi kebhinekaan. Artinya, Pancasila mendorong masyarakat Indonesia untuk bersikap terbuka untuk menentukan konsensus dasar yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan antargolongan. Dengan kata lain ada kebutuhan untuk menciptakan rekonsiliasi atas perbedaan dan kebutuhan untuk mengekspresikan tujuan secara bebas dalam bingkai kebhinekaan. Konsensus tersebut mengarah pada nilai-nilai dasar persatuan yang ada di dalam Pancasila yang berupa loyalitas masyarakat dalam memahami dan mempraktikkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan secara totalitas (Sastrapratedja, 2001).

Ketiga, peran moralitas Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Transformasi budaya menjadi langkah awal munculnya globalisasi bagi semua bangsa. Standar kehidupan yang universalitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang esensial telah membentuk pola dari globalisasi. Dalam transformasi budaya, proses globalisasi menjadi jalan utama untuk

mewujudkannya, adanya proses perubahan baik dalam tatanan nilai, sosial, budaya dan politik. Perubahan tersebut biasanya mengacu pada tujuan yang sama, yakni pembaharuan kelayakan kehidupan dengan berbagai standar dan pegangan. Namun, dalam proses tersebut ada hal-hal yang tidak selaras dengan kondisi dan konteks nilai dari suatu bangsa, hal ini kemudian menimbulkan kepincangan terhadap berbagai hal, terutama dalam aspek nilai, moral dan identitas bangsa (Sastrapratedja, 2001).

Moralitas Pancasila dalam persoalan globalisasi memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mengenali dan membawa diri kepada pengenalan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Moralitas Pancasila menurut Michael Sastrapratedja membentuk suatu identitas nasional yang sengaja dibangun dan ditanamkan pada diri masyarakat Indonesia, identitas tersebut adalah perasaan cinta terhadap bangsa Indonesia, merasakan bagian dari "keindonesiaan" yang memunculkan rasa identitas diri kebangsaan dan kesetiaan yang tinggi. Perasaan "keindonesiaan" tersebut akan membentuk perisai diri ketika berhadapan dengan persoalan globalisasi.

Moralitas Pancasila dalam menyikapi globalisasi menurut Michael Sastrapratedja tidaklah bersikap tertutup, tetapi Pancasila bersikap terbuka terhadap perubahan, hanya saja Pancasila telah mengantisipasi perubahan-perubahan negatif yang terjadi. Sikap terbuka memberikan warna yang berbeda bagi perkembangan bangsa Indonesia, karena tidak semua globalisasi membawa pengaruh yang negatif terhadap bangsa. Banyak aspek positif yang justru dapat diambil dari perubahan-perubahan yang ditawarkan melalui globalisasi. Selanjutnya penerimaan pluralitas dengan toleransi berasaskan hak asasi manusia, artinya bahwa perubahan-perubahan yang dibawa melalui globalisasi dilihat secara aspek universalitas manusia, tidak menutup diri akan dua sisi yang dibawa (positif dan negatif), dengan kesediaan menerima universalitas dan pluralitas mencerminkan potret kehidupan bangsa Indonesia yang bergam. Tetapi kemudian penerimaan akan universalitas tersebut harus dibarengi dengan konsensus dasar nilai-nilai Pancasila yang termasuk di dalamnya budaya dan *local wisdom* sebagai unsur integrasi bangsa yang mencoba menyeimbangkan dan mempertahankan persatuan kebudayaan bangsa.

4) Transformasi dan Kritik Sosial sebagai Tujuan Nasionalisme

Nasionalisme bagi Michael Sastrapratedja merupakan produk dari modernitas dan transformasi budaya. Nasionalisme muncul karena adanya peran industrialisasi yang memaksa manusia untuk memenuhi kebutuhan bersama demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan. Modernitas tidak selamanya diartikan sebagai sesuatu yang negatif jika berhadapan langsung dengan nasionalisme. Sisi positif dari modernitas bagi Michael Sastrapratedja adalah mendorong bangsa untuk memberikan peluang terhadap perubahan atau transformasi ke berbagai hal dalam kehidupan bangsa dan negara.

Kemajuan teknologi dan informasi merupakan suatu perkembangan budaya yang berdampak pada aspek kehidupan lainnya, baik ekonomi, pendidikan, gaya hidup, bahkan politik. Kemajuan yang terjadi tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kebangsaan, semakin suatu bangsa mencoba menjauhi suatu kemajuan, maka akan semakin tertinggal suatu negara tersebut. Dorongan kemajuan memberikan langkah idealitas terhadap kehidupan kebangsaan yang dinamis dan luas.

Menurut Sastrapratedja (2001) transformasi budaya tidak bisa dilepaskan dari kesadaran akan martabat manusia. Transformasi budaya bertujuan memenuhi keadilan yang sejalan dengan martabat manusia. Ranah globalisasi telah mencoba untuk membawa nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental secara universal. Nilai-nilai kemanusiaan menurut Michael Sastrapratedja menjadi hal yang esensial bagi semua bangsa, hal yang ingin diwujudkan adalah hidup yang layak bagi manusia dan sesuai dengan martabat manusia. Martabat manusia pada kebudayaan modern bagi Michael Sastrapratedja menjadi salah satu acuan mengevaluasi perkembangan kebudayaan dan nasionalisme.

Aspek-aspek yang terkandung di dalam martabat manusia (*dignity of man*) bermuara pada kesadaran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki peran dan kewajiban yang utuh dan totalitas terhadap kedua bagian tersebut. Martabat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan taraf hidup manusia yang lebih baik hadir melalui kreativitas manusia yang membudaya. Hal ini akan berdampak pada perubahan pola hidup, kognitif, dan juga pada lingkup sosial. Transformasi budaya yang dibarengi dengan kesadaran nilai-nilai kemanusiaan yang universal tersebut akan membawa manusia pada kehidupan modern yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan juga masyarakat internasional secara nasional. Hal ini menurut Sastrapratedja (2001) jika dikorelasikan ke dalam kehidupan kebangsaan Indonesia hakikat kemanusiaan itu merupakan manifestasi sila

kemanusiaan Pancasila yang dilanjutkan pada kesadaran nasionalisme yang mengarah pada keadilan sosial.

Modernitas dan nasionalisme menurut Michael Sastrapratedja bukan sesuatu yang bertentangan. Proses peradaban yang historis telah menjadi bukti lahirnya nasionalisme di berbagai negara di dunia. Modernitas dalam konteks nasionalisme merupakan suatu instrumen bagi nasionalisme untuk berkembang, nasionalisme hadir dengan konsep yang belum matang dan masih berproses. Proses kematangan nasionalisme tidak akan pernah sampai pada puncak akhir seiring dengan perkembangan zaman. Nasionalisme akan bergerak maju mengikuti perkembangan zaman, hanya saja di Indonesia nasionalisme memiliki pedoman dan arah yang telah ditentukan melalui nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan nasionalisme sejalan dengan kebutuhan zaman dan tuntutan hakikat manusia yang adil dan memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Nasionalisme pada zaman sekarang bentuknya tidak lagi sama dengan nasionalisme lima puluh tahun yang lalu, meskipun arah dan pedomannya tetap sama. Proses nasionalisme yang dinamis memberikan bentuk yang berubah pula tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan adanya perubahan terhadap pola kebudayaan diharapkan nasionalisme mengambil peran dan mampu menempatkan diri yang sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan begitu nasionalisme tidak menjadi suatu sikap yang utopis dan tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Hal inilah yang dibutuhkan negara bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang berkaitan dengan identitas bangsa. Perubahan tetap terjadi sebagai bentuk eksistensi dunia yang dinamis, begitu juga manusia dan sikap nasionalisme yang melekat pada diri setiap individu sebagai suatu bentuk manifestasi dalam aktualisasi dirinya yang dinamis.

c. Refleksi Kritis terhadap Nasionalisme Michael Sastrapratedja dalam Sudut Pandang Filsafat Pancasila

1) Relasi Bangsa dan Negara

Konsep *civil society* muncul sebagai respon terhadap keruntuhan paradigma sosial dan tatanan sosial yang diakibatkan antara lain oleh tindakan mandiri individu, pertumbuhan ekonomi pasar, komersial tanah, tenaga kerja telah menjadi kekuatan pendorong untuk memikirkan kembali model masyarakat dan kekuasaan (Sastrapratedja, 2001). Tujuan utama dari *civil society* adalah pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Hal terpenting dari *civil society* kemudian adalah bagaimana *feedback* yang bisa diberikan masyarakat terhadap negaranya sebagai bentuk sikap nasionalisme yang diberikan.

Konsep *civil society* di Indonesia merunut pada penerimaan dan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila, yakni penerapan nilai toleransi dan nasionalisme. Aspek toleransi salah satunya kesediaan menerima pluralisme; pluralisme dalam bentuk sistem politik, kemajemukan nilai moral, keanekaragaman norma budaya dan tentang distribusi kekuasaan politik. Adapun nasionalisme menekankan pada dua aspek, yakni nasionalisme politis dan nasionalisme budaya. Ranah nasionalisme ini bermuara pada sikap loyalitas dan mampu menempatkan diri sesuai dengan tugas serta peran masing-masing elemen bangsa.

Upaya pemberdayaan *civil society* menurut Michael Sastrapratedja juga dilakukan melalui demokratisasi. Artinya, masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menjalankan nilai inti demokratik (melalui kedaulatan rakyat, partisipasi politik, akuntabilitas dan persamaan). Keempat aspek tersebut membentuk sikap demokratik bagi *civil society* yang bertujuan mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pemberdayaan masyarakat dalam konsep *civil society*. Aspek demokratisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam merealisasikan nasionalisme dengan tujuan akhir menciptakan keadilan sosial secara merata.

2) Relasi Bangsa dan Kemanusiaan

Sastrapratedja melihat relasi bangsa dan kemanusiaan merupakan manifestasi dari penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada Pancasila. Hal yang paling disoroti dalam konteks ini (berkaitan dengan kemanusiaan universal) adalah menghormati harkat martabat manusia dengan segala hak-hak asasi yang terdapat di dalamnya. Manusia menurut Michael Sastrapratedja harus diperlakukan selayaknya manusia (sebagai subjek dan bukan sebagai objek). Hak asasi manusia mencoba menjabarkan bagaimana memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Pancasila menurut Michael Sastrapratedja sangat terbuka untuk mengembangkan hak asasi manusia, karena Pancasila pada dasarnya dipandang sebagai rumusan dasar hak-hak asasi manusia. Dilihat dari sejarahnya berbagai perumusan hak-hak asasi manusia terjadi bersamaan dengan munculnya kesadaran manusia akan martabatnya

sebagai manusia, akan apa-apa yang paling esensial bagi diri manusia. Sejarah munculnya perumusan hak-hak asasi manusia bersamaan pula dengan perjuangan rakyat menghadapi kekuasaan yang mutlak. Universalitas hak asasi manusia menunjuk pada dua hal; yaitu hak-hak asasi terkait dengan apa yang paling asasi pada manusia untuk dapat hidup dan universalitas standar dari kesadaran kemanusiaan yang sama (Sastrapratedja, 2001). Hak asasi manusia menurut Michael Sastrapratedja tidak lagi menjadi isu ideologis semata, tetapi sebagai tuntutan untuk melaksanakan konstitusi, sehingga ke depannya konsep Hak Asasi Manusia bisa menjadi acuan dasar kritik terhadap pelanggaran aspek kemanusiaan, perjuangan kelompok dan sebagai legitimasi kelompok.

3) Relasi Bangsa dan Religi (Aspek Ketuhanan)

Nasionalisme Michael Sastrapratedja memberikan porsi yang besar bagi perkembangan nasionalisme positif. Hal ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang toleran ke dalam dan tidak *chauvinis* keluar. Prinsip tersebut bagi Michael Sastrapratedja dijiwai oleh aspek spirit yang dihidirkan dalam nasionalisme Indonesia, bahwa Tuhan merupakan penyebab utama dari adanya perbedaan, dan manusia memiliki keterbatasan tentang beberapa hal. Sikap positif menerima perbedaan itu harus dilandaskan pada asas hakikat Tuhan sebagai penyebab segala sesuatu. Hubungannya dengan konteks kebangsaan kemudian adalah peran manusia sebagai agen dalam menciptakan persatuan dapat mengilhami bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya perpecahan dikarenakan perbedaan-perbedaan yang ada. Langkah nyata perealisasi hakikat keberagaman adalah dengan menerima perbedaan sebagai langkah untuk mewujudkan persamaan visi melalui toleransi terhadap sesama. Komponen utama terkait keberagaman adalah merealisasi kebhineka tunggal ikaan dalam makna hakikat dan kehendak Tuhan yang harus diterima, dipahami, dan ditaati sebagai bentuk rasa syukur kepada-Nya. Rasa syukur tersebut dilaksanakan dengan melihat keberagaman manusia dalam wujud cinta kasih (asas kemanusiaan), adil (tidak semena-mena), dan hidup berdampingan secara damai dengan prinsip gotong-royong.

Sastrapratedja (2001) juga menyatakan bahwa sikap nasionalisme seharusnya memiliki sikap imperatif etis; yakni pertama, dengan menghormati keyakinan religius masyarakat Indonesia dan bagi negara menjamin kebebasan beragama, serta kedua, dalam masyarakat yang majemuk dalam hal agama, kerja sama dan persatuan untuk membangun bangsa dan negara merupakan suatu keharusan.

4) Hakikat Satu dalam Persatuan yang Integralistik

Sastrapratedja memaknai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Hal ini sebagai bentuk religiusitas bangsa Indonesia dalam memaknai perbedaan. Perbedaan bukan sebagai jalan pemisah dalam mencapai cita-cita bersama, justru perbedaan sebagai upaya menuju kedewasaan masyarakat dalam negara dan bangsa. Perbedaan menciptakan suatu harmoni yang dapat dimaknai sebagai penjelmaan munculnya nasionalisme. Indonesia bukan dibentuk karena satu unsur yang sama, melainkan terbentuk dari keharmonian atas perbedaan-perbedaan yang tercipta dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Identitas nasional menurut Sastrapratedja (2001) bukan sifat bawaan dari lahir, melainkan suatu hasil dari proses transformasi dalam interaksi dengan lingkungan kebangsaan. Identitas nasional merupakan rangkaian makna yang disusun dan menjadi identitas kebangsaan, dalam hal ini adalah "bangsa Indonesia". Penjabaran identitas nasional tidak cukup dengan mengartikan "keindonesiaan" saja, tetapi lebih dalam lagi mengerti makna dan simbolik yang ada pada Indonesia. Hal tersebut menjadikan identitas nasional berkorelasi dengan kebudayaan nasional, yang memuat wacana keberagaman budaya dalam kesatuan. Identitas nasional menjadi ikatan yang kuat untuk memahami kepribadian bangsa, maka padanya akan merefleksikan keharusan memiliki sikap kesetiaan pada ikatan-ikatan primordial yang telah ditransformasikan ke dalam ikatan bangsa yang menjadi sumber makna identitas budaya. Proses pengembangan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengedepankan asas-asas wawasan nasional kebangsaan yang di dalamnya telah memuat revitalisasi identitas diri bangsa yang bisa menangkal homogenitas (universalitas) unsur-unsur budaya global.

Ingatan kolektif menjadi penting ketika dihadapkan pada persoalan nasionalisme karena di dalamnya memuat ingatan bersama yang dihayati oleh komunitas suatu bangsa yang mampu mempererat ikatan komunitas bangsa tersebut. Ingatan kolektif sebagai rangkaian ingatan masa lalu bangsa yang mampu membantu membangun solidaritas dan kehidupan sosial. Ingatan kolektif bagi Michael Sastrapratedja berada pada perjuangan bangsa Indonesia tentang historisitas masa lalu sebagai narasi historis yang mampu mempersatukan visi dan perjuangan

bangsa, dalam hal ini salah satunya adalah ingatan akan usaha memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingatan tersebut tidak boleh hilang dari memori bangsa yang sarat akan makna persatuan dan kesatuan. Tujuan akhir dari ingatan kolektif adalah tetap mempertahankan aspek multikulturalisme dan komitmen bangsa untuk menjaga persatuan yang terintegrasi bagi seluruh bangsa Indonesia.

d. Kontribusi Konsep Nasionalisme Michael Sastrapratedja terhadap Pengembangan Karakter Bangsa (Konteks Globalisasi)

Karakter dapat diartikan sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat tabiat, dan watak (Sugita, 2018). Pengertian tersebut mengarah pada *human-personality approach*, jika dikaitkan dengan bangsa, pengertian karakter akan mengarah pada historisitas dan pengalaman dari suatu bangsa. Nilai-nilai yang berasal dari perjuangan suatu bangsa yang melekat menjadi ciri watak dari suatu bangsa berdasarkan peristiwa-peristiwa, keunikan, maupun keberagaman yang dimiliki oleh bangsa tersebut dari waktu ke waktu. Ukuran kekuatan suatu bangsa bukanlah diukur berdasarkan besarnya wilayah ataupun banyaknya jumlah penduduknya, melainkan dari seberapa besar tekad dari penjelmaan karakter dari suatu bangsa tersebut. Karakter bangsa menuntut adanya kesamaan kemauan, sikap mental dan loyalitas di dalamnya. Karakter bangsa memberikan cerminan yang jelas terhadap bagaimana bangsa tersebut dipandang, dalam artian karakter bangsa berperan sebagai wajah sejati dari suatu bangsa.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk, sehingga kemajemukan tersebut menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Ciri kemajemukan tersebut lebih dalam lagi menghadirkan keberagaman serta perbedaan, menuju pada satu komitmen yang kuat untuk dapat berdirinya bangsa Indonesia, komitmen tersebut adalah kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan menjadi salah satu karakter bangsa Indonesia yang terjelma melalui dasar negara Indonesia, yakni Pancasila sehingga Pancasila menjadi acuan utama bagi pengembangan karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari hakikat Tuhan, kemanusiaan, asas nasionalisme, demokrasi dan keadilan yang harus terpenuhi pada semua elemen bangsa.

Karakter bangsa Indonesia yang tercermin pada Pancasila merupakan hal yang mutlak. Namun, dalam perjalanannya ada proses untuk membangun karakter yang inklusif, artinya adanya persatuan dari semua elemen bangsa Indonesia secara historis. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Pancasila tidak berhenti sebagai alat pemersatu bangsa, tetapi lebih jauh Pancasila harus membawa pada transformasi bangsa dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai penunjuk arah yang dinamis, mengarah pada aktualisasi aspek kreativitas dan prestasi pada tujuan lokal dan internasionalisme. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Siswanto (2015), bahwa Pancasila tidak menganggap sepi setiap perubahan atau hal-hal baru. Perubahan tetap dianggap penting, akan tetapi dalam rangka perubahan, jati diri harus tetap dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila tetap ingin menjadi manusia “baru”, tetapi tetap mengusung konsep manusia “lama”, sehingga aspek “lama” dan “baru” tetap melekat di dalamnya. Adapun hal “lama” yang dimaksud adalah pedoman nilai-nilai serta historisitas yang melekat pada diri bangsa Indonesia, sedangkan hal “baru” merupakan pembangunan bangsa yang berkarakter yang membawa pada perubahan secara dinamis-humanis. Latif (2015) menyatakan bahwa revolusi Pancasila bukan revolusi borjuis, bukan pula revolusi proletar, melainkan revolusi kemanusiaan yang kongruen dengan tuntutan hati nurani manusia (*the social conscience of man*) yang bersifat universal dan melampaui batas kelas dan golongan. Pernyataan tersebut memaknai, bahwa salah satu tanggung jawab terbesar bangsa Indonesia adalah menciptakan manusia Indonesia yang mengerti perubahan secara positif dengan menyertakan kesadaran kemanusiaan di dalamnya.

Nasionalisme Michael Sastrapratedja telah memberikan satu visi yang jelas bagaimana bangsa Indonesia mengambil sikap secara internasionalisme. Bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi yang memaksa komponen bangsa untuk ikut andil di dalam persinggungannya. Artinya, ada tantangan besar yang harus dihadapi bangsa Indonesia secara umum. Globalisasi pada ranah ini menjadi objek yang harus diolah, baik dalam perspektif yang luas dan positif maupun secara sempit mengarahkan pada pengertian secara negatif. Michael Sastrapratedja menganggap bahwa globalisasi sebagai peluang yang besar untuk menata bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat pula. Kemajuan industri, teknologi dan informasi merupakan instrumen utama bagi bangsa Indonesia untuk ikut andil dalam pergulatan globalisasi. Hal tersebut setidaknya harus melibatkan manusia, dalam hal ini warga bangsa Indonesia itu

sendiri. Keterlibatan masyarakat Indonesia tersebut mengarah pada landasan humanis yang meliputi sikap mental bangsa terhadap transformasi sosialbudaya akibat globalisasi. Berbicara tentang transformasi dan kemajuan bangsa, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat suatu bangsa itu sendiri. Paradigma kemajuan masyarakat modern secara faktual dan esensial sangat erat kaitannya dengan sistem kebudayaan, singkatnya kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari kebudayaan yang dipegang suatu masyarakat tersebut (Yusuf, 2015).

Michael Sastrapratedja mengedepankan identitas nasional dan ingatan kolektif dalam upaya membentuk karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional dan ingatan kolektif bangsa tersebut akan mengarahkan masyarakat pada persatuan yang integralistik yang berasaskan sikap gotong-royong dan welas asih terhadap sesama. Sikap mental dari karakter bangsa tersebut menjadi acuan dalam menghadapi transformasi sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia tidak hanya dituntut untuk bersatu, tetapi juga harus kritis, berprestasi, mandiri dan memiliki pengetahuan yang luas demi mewujudkan Indonesia yang merdeka, baik secara fisik (yang mengarah pada perubahan fisik bangsa) maupun aspek mentalitas yang kreatif dan inovatif. Sikap gotong-royong bagi Michael Sastrapratedja akan membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan secara humanis yang internasional. Dalam artian ketika berkreativitas dalam kancah global, maka asas kemanusiaannya sudah jelas sehingga tidak melanggar hak-hak masyarakat global. Persatuan integralistik dalam transformasi sosial budaya secara global akan menjadi karakter utama dalam upaya nasionalisme yang dinamis, progresif dan terarah menuju bangsa Indonesia sebagai bangsa internasionalisme yang bermartabat dan berkarakter Pancasila.

Gotong-royong menurut Soekarno merupakan “Eka Sila” yang menjadi inti dari Pancasila, yang diperas dari “Tri Sila” yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan (Burlian, 2020). Senada dengan hal tersebut, Latif (2015) menyatakan bahwa modal sosial untuk mengembangkan persatuan Indonesia harus dipupuk rasa mencintai dan bangga menjadi Indonesia, merawat persatuan dalam keragaman, kesiapan untuk gotong-royong, serta kerelaan berkorban demi kepentingan umum. Secara umum, gotong-royong dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif demi tujuan bersama (Effendi, 2013). Sehingga, dengan beberapa penjelasan tersebut, menjadikan aspek dasar dalam pengembangan karakter bangsa menurut Michael Sastrapratedja ini sesuai dengan tujuan akhir dari Pancasila.

4. Simpulan

Nasionalisme menurut Michael Sastrapratedja merupakan penjelmaan atas wawasan kebangsaan dan memiliki arti penting ketika dihadapkan pada tantangan internasionalisme. Hal tersebut berarti bahwa nasionalisme memberikan pemahaman tentang bagaimana meninjau ulang aspek-aspek kebangsaan secara internal. Tujuan terpentingnya adalah menciptakan kesadaran tentang wawasan kebangsaan sendiri (nasional) sebelum memahami wawasan dunia internasional secara global. Nasionalisme Michael Sastrapratedja fokus pada pendewasaan sikap mental bangsa untuk menghadapi tantangan yang bersifat global. Globalisasi dan modernitas tidak diartikan sebagai ancaman, melainkan suatu kesempatan untuk melakukan transformasi menuju kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada asas kemanusiaan universal dan asas nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme Michael Sastrapratedja berbentuk kritis-progresif visioner yang melihat tujuan nasionalisme sebagai sebuah transformasi.

Aspek filosofis dari nasionalisme dalam pandangan Michael Sastrapratedja memuat konstruksi filsafat Pancasila, yang memaknai dimensi historis dan dinamis dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Dimensi tersebut dijabarkan melalui relasi antara bangsa dan negara, relasi bangsa dan humanisme serta relasi bangsa dan aspek religi (ketuhanan) sebagai wujud relasi antarsila dalam Filsafat Pancasila. Hakikat persatuan yang terdapat pada konsep nasionalisme Michael Sastrapratedja merupakan penjelmaan dari asas sila persatuan Indonesia yang menekankan pada hakikat “satu” dalam persatuan yang integralistik. Pelaksananya diwujudkan melalui pengembangan kepribadian bangsa dan integrasi serta pengembangan identitas nasional dan ingatan kolektif. Hal tersebut juga memberikan peluang yang besar untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang memiliki daya saing dan kreativitas secara global tanpa menghilangkan moralitas Pancasila yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Acemoglu, Daron, & Robinson, J., A. (2012). *Why Nations Fail; The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. Crown Publishing Group.
- Anaid, Anwar. (2014). Globalist Nationalism: A Theoretical Approach to The Nature of Nationalism in The Modern Global Political Economy. *European Scientific Journal*, 10(16), 129-145. <https://doi.org/10.19044/esj.2014.v10n16p%25p>
- Bakker, Anton, & Zubair, A., C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bakry, Ms., Noor. (2001). *Orientasi Filsafat Pancasila*. Liberty.
- Burlian, Poisol. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 143-169.
- Effendi, Tadjuddin Noer. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Pembahasan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila*. Paradigma.
- Kirom, Syahrul. (2011). Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 99-117. <https://doi.org/10.22146/jf.3111>.
- Kohn, Hans. (1985). *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. Macmillan.
- Kusumawardani, Anggraeni, & Faturochman. (2015). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2), 61-72. <https://doi.org/10.22146/bpsi.7469>.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. (2014). *Air Mata Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Mizan.
- Latif, Yudi. (2015). *Revolusi Pancasila*. Mizan.
- Notonagoro. (1980). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh.
- Perry, Marvin. (2013). *Peradaban Barat dari Revolusi Prancis hingga Zaman Global*. Terjemahkan oleh Saut Pasaribu. Kreasi Wacana.
- Sastrapratedja, M. (2001). *Pancasila Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Universitas Sanata Dharma.
- Sastrapratedja, M. (2013). *Lima Gagasan yang Dapat Mengubah Indonesia*. Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila.
- Siswanto, Joko. (2015). *Pancasila (Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila)*. Lembaga Ladang Kata.
- Sudiarja, A., Subanar, G. Budi, Sunardi, & Sarkim, T. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugita, I. W. (2018). Pendidikan Budaya dan Karakter. *Jurnal Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 5(2), 42-50. <https://doi.org/10.25078/gw.v5i2.641>.
- Suryatni, Luh. (2016). Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum sebagai Dasar Rule of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 53-70. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>.
- Yusuf, H. (2015). Kebudayaan Nasional dan Ketahanan Bangsa Meneropong Jiwa Nasionalisme Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 46-63. <https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.1640>.